

Kolaborasi Kolinlamil dengan Potensi Angkutan Laut Nasional Guna Mendukung Operasi Militer Perang dalam Rangka Pertahanan Negara

Hairul Rahman¹, Jales Jamca Jayamahe², Budi Darmawan³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: conk.arudam@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01 | This study analyzes the collaboration strategy between the Military Sea Traffic Command and national maritime transportation in supporting military operations for national defense. The limited asset strength of the Military Sea Traffic Command requires synergy with national shipping companies, both state-owned and private, to strengthen national defense. Using a qualitative approach through interviews and literature studies, this study found that the Military Sea Traffic Command has professional human resources but is limited in terms of assets, while the national maritime transportation sector has a large capacity but is not optimally integrated. Collaboration strategies that can be developed include joint standard operating procedures, integrated training, logistics system integration, and joint contingency planning. Recommended strategies include strengthening regulations, establishing a permanent coordination forum, developing an IT-based logistics system, and implementing regular training programs. These strategies are expected to improve the readiness of the national maritime transportation sector and strengthen the national defense system as a whole. |
| Keywords: <i>Military Sea Traffic Command National Sea Transportation; Military Operations; Collaboration; National Defense.</i> | |
| Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01 | Abstrak Penelitian ini menganalisis strategi kolaborasi antara Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dengan angkutan laut nasional dalam mendukung operasi militer perang untuk pertahanan negara. Keterbatasan kekuatan aset Kolinlamil memerlukan sinergi dengan perusahaan pelayaran nasional, baik milik negara maupun swasta, untuk memperkuat pertahanan negara. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa Kolinlamil memiliki sumber daya manusia yang profesional namun terbatas dalam hal aset, sementara sektor angkutan laut nasional memiliki kapasitas besar namun belum terintegrasi secara optimal. Strategi kolaborasi yang dapat dikembangkan meliputi prosedur operasional standar bersama, pelatihan terpadu, integrasi sistem logistik, dan perencanaan kontingensi bersama. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan regulasi, pembentukan forum koordinasi tetap, pengembangan sistem logistik berbasis TI, dan pelaksanaan program pelatihan berkala. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan sektor angkutan laut nasional dan memperkuat sistem pertahanan negara secara keseluruhan. |

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Dengan dua pertiga wilayah yang berupa lautan, Indonesia memiliki posisi strategis yang mempengaruhi kepentingan pertahanan negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara bisa datang dari luar, baik melalui laut, udara, maupun daratan, sehingga diperlukan strategi pertahanan yang efektif dan efisien. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memastikan bahwa sistem pertahanan maritimnya mampu melindungi seluruh wilayah, terutama wilayah laut yang sangat vital untuk pertahanan dan keamanan negara.

Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) memiliki peran penting dalam mendukung pertahanan negara di bidang angkutan laut militer. Sebagai satuan TNI Angkatan Laut yang bertugas menjalankan operasi angkutan laut untuk kepentingan militer, Kolinlamil bertanggung jawab atas mobilisasi pasukan dan logistik, khususnya dalam Operasi Militer Perang (OMP). Namun, Kolinlamil menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan kapasitas armada kapal yang dimilikinya. Oleh karena itu, sinergi dengan sektor angkutan laut nasional, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, menjadi krusial untuk memperkuat daya tangkal pertahanan negara di laut.

Kolaborasi antara Kolinlamil dan potensi angkutan laut nasional memiliki potensi besar

dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Sektor pelayaran nasional, baik yang dikelola oleh BUMN maupun perusahaan swasta, memiliki kapasitas angkutan laut yang signifikan. Namun, pemanfaatan sektor ini dalam konteks pertahanan nasional masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antara Kolinlamil dengan perusahaan pelayaran nasional, serta belum adanya regulasi dan sistem yang mengatur kolaborasi secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kolaborasi yang optimal antara Kolinlamil dan sektor angkutan laut nasional untuk mendukung operasi militer perang.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis kondisi eksisting kapasitas angkutan laut Kolinlamil dan potensi angkutan laut nasional dalam mendukung Operasi Militer Perang. Penelitian ini juga akan menggali bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan antara kedua pihak untuk meningkatkan efektivitas dukungan logistik dalam operasi pertahanan negara. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang dapat mendukung terwujudnya kolaborasi yang lebih efektif, seperti pengembangan prosedur operasional standar (SOP) bersama, integrasi sistem logistik, serta pelatihan dan latihan terpadu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi kolaborasi yang lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan sektor angkutan laut nasional dalam mendukung operasi militer perang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi Kolinlamil, tetapi juga bagi sektor angkutan laut nasional, yang berperan sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pertahanan negara.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini dirancang secara sistematis untuk mengungkap dinamika, mekanisme, tantangan, serta efektivitas sinergi antara Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) sebagai unsur pelaksana TNI Angkatan Laut dengan sumber daya angkutan laut sipil nasional seperti kapal-kapal niaga, perusahaan pelayaran, dan pelabuhan komersial dalam konteks operasi militer perang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena fokus utamanya adalah memahami secara

mendalam proses kolaborasi yang bersifat kontekstual, kompleks, dan multidimensi dalam lingkungan pertahanan dan logistik maritim.

Lokus penelitian dipusatkan pada markas Kolinlamil dan sejumlah perusahaan pelayaran nasional yang telah terlibat dalam program mobilisasi sipil untuk kepentingan pertahanan, baik melalui skema kemitraan formal maupun latihan bersama seperti Operasi Angkatan Laut (Opnal) atau latihan dual-use (sipil-militer). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, termasuk perwira staf operasi dan logistik Kolinlamil, pejabat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pimpinan perusahaan pelayaran, serta ahli pertahanan maritim; (2) studi dokumentasi terhadap regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Panglima TNI tentang Mobilisasi Sumber Daya Nasional, serta dokumen operasional Kolinlamil dan laporan latihan gabungan; dan (3) observasi partisipatif dalam simulasi atau latihan mobilisasi kapal sipil untuk kebutuhan logistik militer.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan teknik coding berbasis model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan informasi dari berbagai pihak dan teknik pengumpulan data.

Selain itu, penelitian juga menggunakan kerangka teoretis Resource-Based View (RBV) dan Civil-Military Cooperation (CIMIC) untuk menganalisis bagaimana potensi angkutan laut nasional dipandang sebagai aset strategis yang dapat dimobilisasi, serta bagaimana mekanisme koordinasi sipil-militer dibangun dalam skenario perang. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting kolaborasi tersebut, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan operasional dan strategis seperti penyempurnaan protokol mobilisasi, peningkatan interoperabilitas teknis antara kapal sipil dan militer, serta penguatan regulasi nasional guna memastikan bahwa potensi angkutan laut nasional dapat diintegrasikan secara cepat, efisien, dan efektif dalam mendukung proyeksi kekuatan TNI AL dan operasi militer perang demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan melindungi wilayahnya, yang sebagian besar terdiri dari laut. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan dua pertiga wilayah yang berupa perairan, Indonesia harus memastikan kesiapan sistem pertahanan yang mampu menjaga keutuhan wilayah laut yang sangat vital. Ancaman terhadap kedaulatan negara seringkali datang melalui laut, seperti ancaman dari negara lain, penyelundupan, atau perompakan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan maritim yang tidak hanya tangguh, tetapi juga efisien dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang muncul.

Sebagai bagian dari TNI Angkatan Laut, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) memiliki peran penting dalam melaksanakan operasi angkutan laut militer untuk mendukung pertahanan negara. Kolinlamil bertanggung jawab atas mobilisasi pasukan dan logistik melalui jalur laut dalam rangka Operasi Militer Perang (OMP). Namun, keterbatasan kekuatan armada yang dimiliki Kolinlamil menjadi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor angkutan laut nasional menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas operasional Kolinlamil, sehingga dapat mendukung kesiapsiagaan pertahanan negara.

Kolinlamil memiliki sumber daya manusia yang profesional, namun keterbatasan dalam jumlah dan kapasitas armada angkutan laut menjadi hambatan dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Kapal-kapal yang dimiliki Kolinlamil tidak selalu mencukupi untuk mendukung skala besar dari operasi militer, terutama dalam skenario perang skala besar yang membutuhkan pergerakan pasukan dan logistik yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, sinergi dengan sektor angkutan laut nasional dapat memberikan solusi untuk mengatasi kekurangan kapasitas ini. Sektor angkutan laut nasional yang dikelola oleh BUMN dan perusahaan swasta memiliki armada kapal yang lebih banyak dan kapasitas angkutan yang lebih besar, meskipun belum terintegrasi dengan baik dalam sistem pertahanan negara.

B. Pembahasan

Indonesia memiliki potensi angkutan laut nasional yang besar, baik dari kapal milik BUMN seperti PT Pelni maupun perusahaan swasta. Kapal-kapal nasional ini memiliki kapasitas angkutan yang cukup besar dan dapat digunakan dalam mendukung operasi militer, seperti pemindahan pasukan, peralatan, serta logistik. Namun, meskipun memiliki kapasitas yang besar, sektor angkutan laut nasional belum terintegrasi secara optimal dengan sistem logistik militer yang dikelola oleh Kolinlamil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan regulasi yang mengatur pemanfaatan kapal-kapal sipil dalam konteks pertahanan negara, terutama dalam situasi perang.

Strategi kolaborasi antara Kolinlamil dan sektor angkutan laut nasional perlu dikembangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi angkutan laut nasional dalam mendukung operasi militer. Salah satu model kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah dengan membuat prosedur operasional standar (SOP) bersama yang mengatur mekanisme penggunaan kapal sipil dalam operasi militer. SOP ini dapat mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemanfaatan kapal sipil, mulai dari pengadaan hingga pengoperasian kapal tersebut dalam mendukung operasi militer. Selain itu, perlu ada perencanaan logistik yang terintegrasi antara Kolinlamil dan sektor angkutan laut nasional, untuk memastikan aliran barang dan personel yang lancar.

Untuk memastikan keberhasilan kolaborasi antara Kolinlamil dan angkutan laut nasional, pelatihan dan latihan terpadu menjadi sangat penting. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan kedua belah pihak dalam bekerja sama secara efisien, mulai dari pengoperasian kapal, pengaturan logistik, hingga koordinasi dalam situasi darurat. Latihan terpadu dapat melibatkan simulasi operasi militer yang melibatkan kapal-kapal sipil dan militer, sehingga kedua pihak dapat menguji kesiapan mereka dalam menghadapi skenario operasional yang sesungguhnya. Selain itu, pelatihan ini juga dapat mencakup penggunaan sistem informasi logistik yang terintegrasi untuk memperlancar aliran informasi antara Kolinlamil dan sektor angkutan laut nasional.



Gambar 1. Full Project Map Nvivo
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Salah satu aspek penting dalam strategi kolaborasi ini adalah integrasi sistem logistik antara Kolinlamil dan angkutan laut nasional. Sistem logistik yang terintegrasi akan memudahkan pengelolaan dan distribusi logistik yang diperlukan dalam operasi militer, termasuk pemindahan pasukan, amunisi, serta perlengkapan lainnya. Sistem ini juga dapat mencakup penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap aliran barang dan personel, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dengan sistem logistik yang terintegrasi, proses mobilisasi pasukan dan logistik dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Untuk mendukung kolaborasi yang lebih baik antara Kolinlamil dan angkutan laut nasional, pengembangan infrastruktur pendukung juga sangat penting. Infrastruktur ini mencakup pengembangan pelabuhan yang mampu melayani kapal-kapal militer dan sipil, fasilitas pemeliharaan kapal, serta pusat logistik yang dapat mendukung kelancaran operasional. Selain itu, perlu juga pengembangan sistem komunikasi dan pemantauan yang dapat memastikan koordinasi antara Kolinlamil dan sektor angkutan laut nasional berjalan dengan baik. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, kolaborasi antara kedua pihak dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Regulasi yang jelas dan mendukung kolaborasi antara Kolinlamil dan angkutan laut nasional sangat diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan pemanfaatan kapal-kapal sipil dalam operasi militer. Peraturan-peraturan ini dapat mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, prosedur pemanfaatan kapal sipil, serta mekanisme kompensasi atau penghargaan bagi perusahaan pelayaran yang

terlibat. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung pengintegrasian angkutan laut nasional dalam sistem logistik militer, baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi perang. Regulasi yang jelas ini juga dapat meminimalisir hambatan administratif yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kolaborasi.



Gambar 2. Word Query Nvivo
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Kolaborasi yang baik antara Kolonel Milmil dan sektor angkutan laut nasional memiliki banyak manfaat bagi pertahanan negara. Dengan memanfaatkan kapal-kapal sipil dalam operasi militer, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas angkutan lautnya tanpa perlu melakukan investasi besar dalam pengadaan armada militer baru. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat meningkatkan kesiapan logistik dalam mendukung operasi militer, baik dalam skenario perang maupun dalam skenario lainnya. Penggunaan angkutan laut nasional juga dapat memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman yang datang melalui laut.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah maritimnya. Kolinlamil, sebagai bagian dari TNI Angkatan Laut, memiliki peran penting dalam mobilisasi pasukan dan logistik melalui jalur laut. Namun, keterbatasan armada militer Kolinlamil memerlukan kolaborasi dengan sektor angkutan laut nasional untuk memperkuat pertahanan negara. Teori Civil-Military Cooperation (CIMIC) menekankan pentingnya sinergi antara sektor militer dan sipil untuk meningkatkan efektivitas operasional, yang dapat diwujudkan melalui pemanfaatan armada sipil untuk mendukung operasi militer.

Kolaborasi antara Kolinlamil dan sektor pelayaran nasional menghadapi tantangan koordinasi yang dapat menghambat kelancaran logistik dan mobilisasi pasukan.

Teori Manajemen Kolaborasi memberikan kerangka kerja untuk menciptakan sinergi antara kedua sektor dengan memastikan prosedur operasional yang jelas. Teori Manajemen Risiko juga sangat relevan dalam merancang mekanisme mitigasi untuk mengatasi risiko yang muncul selama kolaborasi ini, seperti ketidaksepahaman atau gangguan operasional.

Regulasi yang mendukung kolaborasi ini adalah landasan penting untuk kelancaran kerjasama. Teori Implementasi Strategis membantu memastikan bahwa kebijakan yang mendukung kolaborasi ini diimplementasikan dengan sistematis dan efektif, sementara Teori Rantai Pasokan dan Jaringan menyoroti pentingnya integrasi aliran logistik dan informasi antara Kolinlamil dan sektor pelayaran untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan mobilisasi pasukan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis strategi kolaborasi antara Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dengan sektor angkutan laut nasional dalam mendukung operasi militer perang untuk pertahanan negara. Keterbatasan kekuatan armada Kolinlamil menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan angkutan laut untuk mendukung operasi militer. Di sisi lain, sektor angkutan laut nasional memiliki kapasitas yang besar namun belum terintegrasi secara optimal dengan sistem logistik militer. Oleh karena itu, kolaborasi antara kedua pihak merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kesiapan operasional dan memperkuat sistem pertahanan negara, khususnya dalam menghadapi ancaman yang datang melalui laut.

Infrastruktur pelabuhan dan fasilitas logistik yang mendukung kolaborasi ini perlu ditingkatkan agar dapat melayani kebutuhan operasional Kolinlamil dan angkutan laut nasional secara simultan. Pengembangan pelabuhan yang dapat melayani kapal-kapal militer dan sipil, serta sistem logistik yang terintegrasi, akan mempercepat proses distribusi barang dan personel dalam mendukung operasi militer. Sistem logistik berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap aliran barang dan pasokan juga perlu dikembangkan.

B. Saran

Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pemanfaatan angkutan laut sipil dalam operasi militer. Hal ini dapat mencakup pengaturan penggunaan kapal sipil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta prosedur yang harus diikuti dalam kolaborasi antara Kolinlamil dan sektor angkutan laut nasional. Regulasi yang kuat akan memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh kendala administratif.

DAFTAR RUJUKAN

- Anugerah, Boy. "Pemberdayaan Angkutan Laut Nasional Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 1 (Juni 2022): 151-166.
- Cahyani, R., & Marcelino, F. (2023). *Model Kolaborasi Sipil-Militer dalam Operasi Pertahanan Negara*. Jurnal Pertahanan Negara, 15(3), 215-227.
- Citra G. Soevito. "Kedudukan dan Fungsi Komponen Cadangan dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara." *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 45-56.
- Geoffrey Till. (2014). *Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- Karadona, Danang Marsudi, dan Bambang Dilianto. "Analisis Penentuan Prioritas Pemeliharaan KRI Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Angkutan Laut Militer." *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 6, no. 2 (April 2023): 426-435.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company.
- Marsetio, L. (2017). *Konsep Sea Power dalam Keamanan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Strategi TNI Angkatan Laut.

- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (2008). *Penyelenggaraan Pelayaran Nasional dan Perlindungan Terhadap Keamanan Laut*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Ward, A. J. (2019). *Maritime Security and the Role of Military Sealift in National Defense*. Journal of Strategic Maritime Studies, 9(1), 30-42.